



# Buletin ISEN

# MULANG

edisi : 304 / Februari 2020

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



Wagub Kalteng Tegaskan Perlu Penguatan Sinergitas dan Komitmen Bersama Laksanakan Program Nawacita dan Kalteng BERKAH.

6



Gubernur Resmikan Jalan Layang Ruas Pangkalan Bun – Kolam

Sekda Kalteng: Pelaku Pungli Tidak Boleh Dibiarkan

9



Bawaslu RI Sosialisasikan Penerapan Pasal 71 UU 10/2016

11



**DITERBITKAN BERDASARKAN  
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

*Nomor : 188.44/*

***Pelindung :***

Gubernur Kalimantan Tengah

***Penasehat :***

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Pengarah :***

Asisten Adminidtrasi Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

***Penanggung Jawab:***

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Pemimpin Redaksi:***

Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi pada  
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum  
pada Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Wakil Sekretaris Redaksi:***

Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi pada  
Biro Protokol dan Penyaringan Informasi dan Publikasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

***Koordinator Distribusi :***

Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan  
dan Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol dan  
Penyaringan Informasi dan Publikasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

***Redaktur :***

Setya SRI Saryanta

***Penyedia Bahan :***

Rani Diah Anggraini

***Staf Redaksi :***

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R.,  
Winda Paskanova, Renny Patrisia,  
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangan.

***Fotografer :***

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

***Layout :***

Benito Zuares

***Operator Komputer :***

Ahmad Salahudin

***Alamat Redaksi :***

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

***Ijin Penerbitan Khusus***

**No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995**

**DAFTAR ISI :**

Gubernur Resmikan Jalan Layang Ruas Pangkalan  
Bun – Kolam\_\_\_3

Sugianto : Pengawasan Penggunaan Dana Desa  
Dilakukan Intensif dan Berjenjang\_\_\_4

Sekitar 2.000 dari 4.427 Peserta Test CPNS Kalteng  
2020, Lewati PG.\_\_\_5

Sekda Kalteng : Katalog Elektronik Mempercepat  
Kinerja Pemerintah\_\_\_5

Wagub Kalteng Tegaskan Perlu Penguatan Sinergitas  
dan Komitmen Bersama Laksanakan Program  
Nawacita dan Kalteng BERKAH\_\_\_6

Ketua Komisi IX DPR RI : Kalteng Kaya Plasma  
Nutfah\_\_\_7

Tanggapan Eksekutif Terhadap 2 Raperda\_\_\_8  
Sekda Kalteng: Pelaku Pungli Tidak Boleh  
Dibiarkan\_\_\_9

Gubernur Lantik Anggota KI Provinsi Kalteng  
Periode 2019-2023\_\_\_10

Bawaslu RI Sosialisasikan Penerapan Pasal 71 UU  
10/2016\_\_\_11

Sugianto : Pemprov Optimalkan Pembangunan  
Jaringan Listrik Pedesaan\_\_\_12

Januari 2020, Kalteng Inflasi 0,06 %\_\_\_12

Gubernur : Sektor Pariwisata Berkontribusi  
Meningkatkan PAD.\_\_\_13

Wagub Resmikan M' Lounge Badara Tjilik Riwt  
Palangka Raya\_\_\_13

Presiden Jokowi Hadiri HPN 2020 Di Banjarbaru  
Kalsel\_\_\_14

GUBERNUR KUKUHKAN PENGURUS KERUKUNAN  
WARGA OT-DANUM\_\_\_15

Gubernur Harapkan Kader HMI Mampu Hadapi  
Tantangan Era Revolusi Industri 4.0\_\_\_16

Geliatkan Sektor Pariwisata, Pasar Hamalem  
Mangkeme Resmi Dibuka\_\_\_17

Gubernur : Pelajar Harus Meningkatkan Kualitas  
Akhlak dan Menjauhi Narkoba\_\_\_18

Gubernur: Pelajar Jauhi Narkoba dan Pergaulan  
Bebas\_\_\_19

Wagub Kalteng Tinjau Sejumlah Desa Terpencil Di  
Barito Timur.\_\_\_19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi,  
Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature  
maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang  
dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman  
Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian  
Informasi Pemerintahan Umum Biro Protokol dan Komunikasi  
Publik Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya,  
Telp/Fax (0536) 4200241

**Website** : <http://www.biropkp.kalteng.go.id>

**Facebook** : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

**Twitter** : [http://www.twitter.com/setda\\_kalteng](http://www.twitter.com/setda_kalteng)

**Instragram** : [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/sekretariat.daerah.kalteng)

**email** : [buletin.isenmulang@gmail.com](mailto:buletin.isenmulang@gmail.com)

## Gubernur Resmikan Jalan Layang Ruas Pangkalan Bun – Kolam



PANGKALAN BUN – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam rangkaian kunkernya ke Kotawaringin Barat meresmikan Jalan Layang pada ruas jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama Kabupaten Lamandau dan Launching Samsat Online Nasional (SAMOLNAS) Provinsi Kalteng, Sabtu (15/02/20).

Jalan layang jenis pile slab yang diresmikan itu sepanjang 3 kilometer dan lebar 9 meter menggunakan APBD Kalteng sejak tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 (tahun jamak) dengan total nilai Rp 294.837.984 miliar.

Jalan ini sangat berfungsi membuka dan memperlancar akses serta memperpendek jarak tempuh dari Pangkalan Bun ke Kabupaten Sukamara melalui Lamandau yang semula 4 jam menjadi 2 jam. “Secara bertahap dan pasti sampai tahun 2020 pembangunan jalan dan jembatan khususnya ruas strategis akan terus dibangun sesuai kemampuan keuangan daerah yang sebagian besar bersumber pada PAD Provinsi Kalteng,” tegas Sugianto.

Selain meresmikan Jalan Layang, di lokasi yang sama Sugianto Sabran juga melakukan Launching SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS) Kalteng sebagai terobosan kemajuanteknologiinformasilayananpembayaran pajak kendaraan bermotor untuk menghindari Pungli dan wajib pajak dapat membayar PKB dimana dan kapan saja. “Saya mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah, Polda dan Bank Kalteng yang telah menjadi Bank Agregator Pelaksana E-SAMOLNAS,” imbuh Sugianto.

Sugianto berharap dengan berjalannya SAMSAT Online Nasional ini, maka pengelolaan penerimaan pajak khususnya PKB dapat

terlayani sampai ke pelosok pedesaan Kalteng, sehingga PAD Kalteng semakin meningkat untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Peresmian Dermaga Pendaratan Ikan Kumai**

KUMAI – BIRO PKP. Sugianto Sabran seuseri meresmikan jalan layang, langsung menuju Kumai untuk meresmikan Dermaga Pendaratan Ikan dan Launching Program Asuransi Nelayan Berkah serta menyerahkan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan secara simbolis kepada perwakilan nelayan setempat.

Kepala Dinas Perikanan Kalteng Darliansyah mengatakan potensi perikanan Kalteng cukup strategis, sehingga memerlukan sarana dan parasana pelabuhan yang memadai. Untuk itu pihaknya melakukan renovasi Dermaga Pendaratan Ikan Kumai dengan dana Rp 31 miliar lebih yang mampu menampung 30 kapal nelayan. “Pemerintah Daerah juga memberikan santunan kepada nelayan melalui kerjasama dengan PT BANK Kalteng,” jelas Darliansyah.

Gubernur Sugianto Sabran meminta para nelayan dan pengusaha kecil agar memanfaatkan dana bank untuk pengembangan usaha, tidak menggunakan rentenir. Demikian juga dengan keberadaan dermaga pendaratan ikan yang baru saja diresmikan agar dimanfaatkan secara optimal. “Dermaga pendaratan ikan ini kita harapkan agar dapat meningkatkan perekonomian nelayan di Kotawaringin Barat, khususnya di Kumai,” jelas Sugianto.

Masyarakat juga diminta menggali potensi daerah dengan baik untuk kesejahteraan, memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.\*\*\*

## Sugianto : Pengawasan Penggunaan Dana Desa Dilakukan Intensif dan Berjenjang.

Palangka Raya – Biro PKP. Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 mendapatkan dana desa Rp.1,403 Triliun lebih yang dialokasi untuk 1.433 desa yang tersebar di 13 Kabupaten se-Kalimantan Tengah.

Pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan dan pengawalan yang lebih intensif oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai bahwa dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa terutama penggunaan dana desa”, tegas Gubernur Kalteng Sugianto pada Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa yang diikuti para Kepala Desa dan Bupati se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis (20/02/20).

Sugianto Sabran mengungkapkan penggunaan dana desa saat ini menjadi sorotan banyak pihak karena dana yang bersumber dari APBN itu memang besar dan rawan disalahgunakan sehingga perlu pengawasan dan pengawalan oleh banyak pihak secara berjenjang. “Dalam hal ini saya juga mohon dukungan Kajati melalui Kajari dan Kapolda melalui Kapolres agar terlibat melakukan pembinaan kepada desa. Pembinaan dimaksud dalam bentuk pencegahan penyalahgunaan, bukan penindakan. Penindakan hanya dilakukan terhadap kasus yang telah benar-benar menyimpang dari ketentuan yang berlaku”, imbuh Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran juga mengapresiasi pemerintah pusat yang mengupayakan dana desa yang telah dialokasikan dalam APBN tersebut dapat tersalurkan secara cepat sehingga cepat pula direalisasikan penggunaannya dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan di desa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah provinsi agar mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung percepatan penyaluran dana desa tersebut. “Pemerintah di daerah juga berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa”, tegas Mendagri dalam sambutan tertulis disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni pada Rapat Kerja tersebut.

Dikemukakan, saat ini Kemendagri dan BPKP sedang mengembangkan sistem pengawasan keuangan desa yang disertai dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mempermudah desa dalam pengadministrasian pengelolaan keuangannya yang telah digunakan 98 % desa di seluruh Indonesia.

Selain itu juga tercatat 10.828 desa pada 57 Kabupaten dan Kota telah online. “Saya berpesan



agar dana desa dikelola dengan batas wilayah desa yang jelas, prioritas kegiatan yang mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa secara padat karya tunai yang disertai dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin baik serta dapat memberikan manfaat bagi desa dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan masyarakat yang lebih sejahtera”, tutur Mendagri.

Tito Karnavian menyebutkan trend pengalokasian dana desa selalu ada peningkatan setiap tahunnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi desa,

Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas bulan Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 menekankan agar penyaluran dana desa dapat dilaksanakan benar-benar efektif dan memastikan dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Pada Rapat Terbatas tersebut Joko Widodo memberikan tiga arahan pokok yaitu, pertama, pemanfaatan dana desa dimulai awal tahun dan diutamakan pemanfaatannya melalui pola program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di Desa.

Kedua, penggunaan dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif di tingkat desa mulai dari pengolahan pasca panen, industri kecil, budidaya perikanan, desa wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dengan manajemen yang baik diikuti oleh pendampingan lapangan yang memadai sehingga tata kelola dana desa semakin partisipatif, transparan dan akuntabel serta memerlukan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa.\*\*\*

## Sekitar 2.000 dari 4.427 Peserta Test CPNS Kalteng 2020, Lewati PG.

Palangka Raya – Biro PKP. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tanggal 3 sampai dengan 11 Maret 2020 di Kantor BKD Kalteng, diikuti 4.427 peserta SKD.

Dari jumlah tersebut sekitar 2.000 peserta berhasil lolos melewati passing grade atau ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan SKD tersebut berjalan lancar dan antusiasme peserta cukup tinggi, terbukti jumlah pesertanya hampir mencapai 5.000 orang.

Namun Plt Kepala Karo Humas BKN Pusat Paryono menyatakan peserta yang berhasil melampaui passing grade atau ambang batas kelulusan tidak otomatis bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang.

Dijelaskan, nilai peserta SKD yang lolos passing grade akan diolah terlebih dulu mengingat satu formasi tidak dilamar oleh peserta dari satu titik lokasi saja. Namun harus digabungkan dengan hasil SKD pelamar dari

berbagai titik lokasi.

Selain itu, dalam pemeringkatan nilai SKD juga harus menyertakan hasil SKD peserta P1/TL. P1/TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 yang memenuhi passing grade SKD dan masuk dalam tiga kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB tahun 2018, tapi dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

Tahap pengolahan data akan dilanjutkan dengan tahap rekonsiliasi data hasil SKD yang melibatkan instansi penyelenggara SKD dan BKN. Hasil rekonsiliasi tersebut akan diajukan kepada Kepala BKN untuk mendapat approval dan digital signature yang dilakukan by system pada portal SSCASN.

Hasil SKD seluruh peserta seleksi akan disampaikan kepada BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui portal SSCASN. Selanjutnya admin instansi dapat mengunduh hasil SKD tersebut, lalu Ketua Panitia Seleksi Instansi akan menetapkan pengumuman/kelulusan SKD kepada publik.\*\*\*

## Sekda Kalteng : Katalog Elektronik Mempercepat Kinerja Pemerintah

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri membuka Sosialisasi dan Penjelasan Tools Assessment Pembentukan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Aula Eka Hapakat, Selasa (11/02/2020).

Sosialisasi dan penjelasan tools assesment pembentukan katalog elektronik lokal Kalteng tersebut diikuti Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan mengenai



Pembentukan Pasar (e-market) di mana katalog elektronik memberikan peluang mendorong

usaha lokal untuk bisa bersaing di era digital sekarang ini.

Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri ketika membuka sosialisasi tersebut menjelaskan E-katalog mempermudah pencarian harga/nilai satuan barang/jasa seperti layaknya aplikasi Go-Food di mana sudah tertera harga dari makanan yang dibutuhkan.

Melalui pembentukan katalog elektronik lokal ini diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik sehingga mempercepat kinerja pemerintah. "Katalog elektronik mempercepat kinerja pemerintah", jelas Fahrizal Fitri.

Spesifikasi harga dalam E-katalog pengadaan barang dan jasa sudah ditetapkan sehingga tidak perlu lagi melalui proses tender.\*\*\*

## Wagub Kalteng Tegaskan Perlu Penguatan Sinergitas dan Komitmen Bersama Laksanakan Program Nawacita dan Kalteng BERKAH.

SAMPIT – BIRO PKP. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengatakan tantangan utama pembangunan daerah Kalimantan Tengah adalah kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing.

Selain itu masih tingginya angka kelahiran pada rentang usia 15 sampai dengan 19 tahun atau usia remaja yang berarti terjadi perkawinan usia dini sehingga berkorelasi dengan lamanya mengenyam pendidikan termasuk kasus stunting, juga merupakan tantangan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Tengah.

“Bila berbicara tentang kependudukan tidak hanya tentang kuantitas atau pengendalian penduduknya, tapi juga bicara tentang kualitas Sumber Daya Manusianya,” jelas Habib Ismail ketika membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu (26/02/20).

Salah satu upaya peningkatan SDM adalah menggelorakan kembali Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Banggakencana. “Saya menyambut baik upaya menggelorakan kembali Program Banggakencana dan meningkatkan SDM melalui salah satu jalan keluarnya adalah Kampung KB. Namun pengelolaan Program Kampung KB memerlukan sinergitas lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM”, kata Habib Ismail.

Wagub mengatakan apabila keberhasilan pendidikan yang ditandai dengan angka partisipasi sekolah dan lamanya sekolah maka tidak langsung akan berdampak pada Program Kependudukan yaitu adanya penundaan usia kawin serta penundaan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk.

Demikian juga apabila Program Banggakencana berhasil maka tidak langsung akan berdampak dalam penurunan kematian ibu dan bayi pada saat proses kelahiran. “Dengan jumlah anak yang terencana, akan memberikan kesempatan dan kemampuan keluarga atau orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang



lebih tinggi”, imbuh Habib Ismail.

Wagub menekankan untuk mencapai sasaran program pemerintah melalui Nawacita dan Kalteng BERKAH perlu penguatan sinergitas dan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah yang wajib dilaksanakan. “BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Pusat di daerah harus dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana termasuk Program Kampung KB, sehingga dapat memberikankan manfaat bagi masyarakat”, beber Wagub.

Sementara itu Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Biro Perencanaan BKKBN RI Siti Fatonah mengharapkan Rakerda tersebut dapat mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan BANGGAKENCANA dengan baik, sehingga tujuan nasional dapat tercapai melalui Visi “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Guna Mendukung Tercapainya

Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kepala BKKBN Pusat juga berharap melalui forum Rakerda Program BANGGAKENCANA Kalteng 2020 ini, komitmen pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai sektor terkait harus ditingkatkan. “Kami yakin dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, maka sasaran-sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan”, tegas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Pada Raker tersebut dilakukan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng M. Irzal dan Penandatanganan Kesepakatan Kerja Kemitraan antara Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota se-Kalteng serta penyerahan Piagam Penghargaan KB kepada beberapa perusahaan. \*\*\*

## **Ketua Komisi IX DPR RI : Kalteng Kaya Plasma Nutfah**

PALANGKA RAYA - BIRO PKP. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyatakan Komisi IX DPR RI mendukung penuh agenda besar pemerintah untuk mewujudkan ketahanan obat nasional sebagaimana tertuang dalam INPRES No.6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi obat dalam negeri.

Ketua Komisi IX DPR RI itu mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dan Staf Ahli Kementerian Kesehatan RI selaku Tim Pendamping dengan jajaran pemerintah provinsi Kalteng dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang dipimpin Sakda Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis (13/02/20).

Felly Estelita Runtuwene menilai Kalteng mempunyai kekayaan alam dan plasma nutfah yang luar biasa, terbukti dengan viralnya temuan pelajar SMA Negrri 2 Palangka Raya tentang tanaman Bajakah yang berpotensi menjadi obat kanker. “Pasti masih banyak bahan alam lain di Kalteng yang masih perlu dikembangkan”, ujarnya.

Kunker Komisi IX DPR RI ke Kalteng itu untuk menjangring informasi dan data yang komprehensif tentang potensi alam Kalteng yang dapat dikembangkan mejadi bahan baku obat sekaligus melakukan pengawasan atau fungsi peni ndakan, intelijen dan penyidikan dalam pengawasan obat asli Indonesia di provinsi Kalteng.

Ketua Tim Komisi IX DPR RI Felly Estelita dari Fraksi Nasdem Sulawesi Utara itu menyambut baik didirikannya pusat pengolahan dan pusat studi obat tradisional tropis. “Kami menyambut

baik didirikannya pusat pengolahan obat tradisional dan pusat studi obat tradisional tropis yang perlu mendapat dukungan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kesehatan dan BPOM sehingga menjadi motor pengembangan dan pemanfaatan obat asli Indonesia,” ucapnya.

Gubernur Kalteng dalam sambutannya disampaikan Sekda Fahrizal Fitri menjelaskan potensi sumber daya alam Kalteng termasuk plasma nutfahnya yang berkhasiat untuk obat-obatan.”Kami sangat berbahagia dan berbangga karena hutan Kalteng memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi termasuk di dalamnya tumbuhan hutan yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan baku dalam industri obat saat ini”, kata Gubernur.

Dikemukakan, hasil penelitian pendahuluan terhadap tanaman Bajakah Tunggal hingga Agustus 2019 menunjukkan bahwa tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat kanker. “Penelitian pendahuluan yang dilakukan siswa-siswi SMAN 2 Palangka Raya itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut”, terang Gubernur.

Dengan viralnya tanaman Bajakah untuk pengobatan kanker beberapa waktu lalu, menyebabkan permintaan terhadap Bajakah sangat besar sehingga Pemda Kalteng mengeluarkan Surat Edaran untuk menertibkan peredaran tanaman Bajakah tersebut. “Kami tidak ingin Bajakah ini dieksploitasi secara besar-besaran dan akhirnya akan punah dari lingkungan alam”, ujar Sugianto Sabran.

Disebutkan, selain Bajakah, di Kalteng juga ada pasak bumi dan banyak lagi tumbuhan lainnya yang bisa digunakan menjadi obat-obatan tradisional dan masyarakat Dayak secara turun-temurun mempunyai pengetahuan dalam menggunakan berbagai tumbuhan hutan yang berkhasiat untuk obat.\*\*\*

## Tanggapan Eksekutif Terhadap 2 Raperda

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan, penjelasan dan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-fraksi pendukung Dewan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Raperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Kalteng No : 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalteng pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020, Selasa (04/02/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng.

Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPTRD Kalteng Wiyatno tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menjelaskan bahwa saran tentang perlu adanya pengaturan penggunaan bahasa yang santun, memberitahukan isu atau permasalahan, tertib ketenagakerjaan, pemanfaatan energi baru terbarukan, penyelenggaraan layanan publik serta penghormatan terhadap simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat, tidak perlu lagi dimasukkan kedalam Raperda karena sudah diatur didalam ketentuan yang lebih tinggi. “Sehingga dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat tidak lagi diatur karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengatur hal tersebut. Begitu juga kesiapan dalam penanganan bencana pada saat terjadi bencana tentunya lebih tepat diatur dalam Perda secara khusus yang mengatur mengenai Penanggulangan Bencana”, terang Wagub.

Habib Ismail juga menegaskan Pencabutan Perda



Nomor : 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah sama sekali tidak akan menghilangkan eksistensi Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah yang ada di beberapa kota besar maupun terhadap pengenaan asrama sebagai objek retribusi daerah.

Pencabutan Perda Nomor : 4 Tahun 2004 itu justru bertujuan meningkatkan sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk Asrama Mahasiswa yang merupakan salah satu Barang Milik Daerah sekaligus perwakilan identitas masyarakat Kalteng yang mempunyai peran strategis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2004 didasari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang secara Yuridis telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Selama ini pengelolaan Asrama Mahasiswa oleh Pemerintah Provinsi tidak dapat dipungkiri belum maksimal, bahkan dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu pencabutan Perda Nomor : 4 tahun 2004 sudah cukup memenuhi dasar filosofis, sosiologis dan yuridis”, beber Wagub.

Disebutkan, pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalteng akan diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda tersebut sudah menjadi usulan Pemerintah Provinsi dalam Program Pembentukan Perda tahun 2020.

“Kita bersama berharap dengan pengelolaan yang profesional dan sistematis terhadap seluruh Asrama Mahasiswa, maka Kalteng dapat mencetak calon-calon sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung keberadaan Asrama Mahasiswa dalam proses pendidikannya”, kata Habib Ismail.

Dijelaskan pula bahwa pengenaan tarif retribusi terhadap Asrama Mahasiswa merupakan kebijakan daerah yang mengacu pada UU Nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kebijakan perubahan tarif dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi.

Demikian juga pengaturan terhadap setiap orang yang melakukan praktek pengobatan tradisional harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Raperda Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Dalam PerMenKes itu disebutkan setiap orang yang melakukan praktek layanan kesehatan tradisional harus memiliki Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT).\*\*\*



## Sekda Kalteng: Pelaku Pungli Tidak Boleh Dibiarkan

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menegaskan bahwa tindakan para pelaku pungutan liar atau Pungli tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Pihak-pihak yang telah menyakiti masyarakat dengan melakukan praktik pungutan liar, tidak boleh dibiarkan,” tegas Fahrizal di depan peserta Rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota se-Kalteng di Palangka Raya, Rabu (19/02/20).

Sekda Kalteng mengharapkan Satgas Saber Pungli tetap meningkatkan

kinerjanya meskipun sudah ada peningkatan kesadaran di lingkungan masyarakat terhadap ancaman praktik pungutan liar khususnya di tingkat provinsi Kalteng. “Semua pihak harus mendukung kinerja Satgas dalam memberantas pungutan liar”, kata Fahrizal.

Dijelaskan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah dan terus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pencapaian telah diraih Kalteng antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 % walaupun berada di tengah tekanan perekonomian global.

Demikian juga tingkat inflasi mampu ditekan menjadi 3,02 %, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan nilai indeks pembangunan manusia hingga 70,42 % serta opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut dan meraih penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dari BPKP pada tahun 2019.

Namun di balik pencapaian tersebut masih ada ruang terjadinya pungutan liar atau Pungli yang merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Praktek tersebut tidak hanya menurunkan wibawa pemerintah, tapi juga secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dunia usaha dan pelayanan masyarakat,” terang Fshrizal Fitri.\*\*\*



## Gubernur Lantik Anggota KI Provinsi Kalteng Periode 2019-2023



Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam era reformasi sudah mengalami perubahan. Rakyat menginginkan transparansi, keterbukaan informasi dan interaksi yang dialogis. Untuk itu diperlukan suatu pemerintahan yang responsif, terbuka dan siap melayani masyarakat.

Pemerintahan yang terbuka diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dan membuka ruang yang lebar bagi pengawasan publik sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. “Dengan adanya prinsip keterbukaan ini, akan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah”, tegas Sugianto Sabran ketika melantik Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2023 di Palangka Raya, Senin pagi (24/02/20).

Dijelaskan, Komisi Informasi merupakan salah satu lembaga mandiri dan independen yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, yang berfungsi melayani masyarakat dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Sugianto Sabran menegaskan, Komisi Informasi juga memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam proses advokasi, edukasi dan literasi tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Keberadaan Komisi Informasi selain mengawal keterbukaan informasi publik, juga dapat

memberikan stimulan bagi pembangunan yang berdemokrasi dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi”, tegas Gubernur.

Untuk itu Komisi Informasi diminta mempersiapkan diri bekerja optimal demi mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam mendapatkan informasi serta menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan keterbukaan informasi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga kondusifitas dan harmonisasi tetap terjaga.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi mengatakan, lima orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah mengikuti proses seleksi sesuai Peraturan Komisi Informasi RI Nomor : 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Agus Siswadi juga menjelaskan, anggaran kegiatan dan operasional sekretariat serta penggajian Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalteng ini berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Lima orang Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2023 yang dilantik Gubernur Kalimantan Tengah itu terdiri Setni Betlina, M. Mukhlas Rozikin, Sri Rosmilawatie, Baneri Repelita dan Daan Rison.\*\*\*

## Bawaslu RI Sosialisasikan Penerapan Pasal 71 UU 10/2016

BANJARMASIN - BIRO PKP. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI memandang perlu melaksanakan sosialisasi penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah Gubernur dan Bupati/Walikota di pulau Kalimantan dan Jawa yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Bawaslu RI termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya dan sejumlah Anggota dan Ketua Bawaslu Kalteng. Sosialisasi tersebut dalam rangka upaya mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.

Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar menjelaskan Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah yang meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten

dan 37 Kota.

Dijelaskan, penetapan Pasangan Calon berdasarkan jadwal program dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan 8 Juli 2020, sehingga Gubernur, Bupati dan Walikota terhitung 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat terhitung 6 bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Gelombang III itu dibuka Ketua Bawaslu RI Abhan di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin Kalimantan Selatan, Selasa pagi (11/2/20). \*\*\*



## Sugianto : Pemprov Optimalkan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan.

Palangka Raya – Biro PKP. Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi Pendukung DPRD Kalteng terhadap Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Senin pagi (24/02/2020).

Gubernur dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Fahrizal Fitri mengungkapkan pelayanan di bidang energi bagi masyarakat Kalteng cukup meningkat, namun masih diperlukan regulasi melalui penyusunan Raperda Rencana Umum Energi Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan energi. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat di pedesaan dan nelayan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dengan merelokasi bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya”, beber Sugianto.

Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2015 sebesar kurang lebih 70 %, di triwulan keempat tahun 2019 sudah mencapai (sekitar) 87 % telah berlistrik. “Memang masih banyak yang perlu kita bersama lakukan untuk mendapatkan rasa keadilan dalam hal pemerataan energi. Salah satu upaya kita untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membentuk suatu regulasi di bidang energi

melalui Raperda (RUED) ini nanti,” lanjutnya.

Berkaitan dengan Raperda tentang Pengelolaan BMD dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang melakukan proses perubahan tata kelola aset sehingga dalam pengelolaan aset terjadi peningkatan efisiensi, efektifitas dan peningkatan nilai tambah dalam pengelolaan aset. “Pemerintah Provinsi Kalteng senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku, dimana pengelolaan aset diatur sejak perencanaan sampai pembinaan dan pengawasan. Untuk itulah pemerintah provinsi Kalteng mengajukan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset yang lebih baik”, terang Sugianto.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Fraksi-Fraksi DPRD atas pandanganterhadap Kedua Raperda tersebut. “Demikian tanggapan, penjelasan, dan jawaban Pemerintah Daerah. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan pikiran Anggota Dewan,” pungkasnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Wiyatno yang dihadiri Waket I DPRD Jimmy Carter dan Waket II DPRD Abdul Razak serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalteng, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala SKPD Provinsi beserta Pejabat Administrator dan Pengawas.\*\*\*

## Januari 2020, Kalteng Inflasi 0,06 %

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah pada Januari 2020 mengalami inflasi 0,06 %, turun dibanding Desember 2019 yang mengalami inflasi 0,66 %.

Inflasi Kalteng pada Januari 2020 ini merupakan agredasi kota sampel inflasi Kalteng yakni Palangka Raya yang mengalami deflasi -0,06 % dan inflasi Sampit 0,27 %. Analisis Fungsi Assesmen Ekonomi BI Kalteng Yudo Herlambang dalam Siaran Pers TPID Kalteng, Selasa (04/02/2020) menjelaskan sebagian besar kota sampel inflasi di pulau Kalimantan mengalami inflasi.

Namun pada tingkat provinsi, inflasi di Kalteng relatif rendah, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kalimantan Utara. “Capai inflasi Kalteng

juga lebih rendah dibanding capaian nasional sebesar 0,39 %”, kata Yudo Herlambang.

Disebutkan, secara umum rendahnya inflasi ini disebabkan oleh relatif terjaganya harga komoditas yang dikendalikan pemerintah di sektor transportasi angkutan udara.

Harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Kota Palangka Raya pada Januari 2020 meliputi ikan gabus 0,10 %, ikan lais 0,04 %, bahan bakar rumah tangga 0,04 %, cabai rawit 0,03 % dan bawang merah 0,03 %.

Kemudian lima komoditas penyumbang inflasi Kota Sampit meliputi rokok kretek filter 0,11 %, ikan tongkol 0,08 %, cabai rawit 0,05 %, rokok putih 0,05 % dan ikan gabus 0,04 %.\*\*\*

## **Gubernur : Sektor Pariwisata Berkontribusi Meningkatkan PAD.**

Palangka Raya – Biro PKP. Pariwisata merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan PAD, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten Sekda Kalteng Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy ketika Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (13/02/2020).

Rakerda Kebudayaan dan Pariwisata ini dinilai penting untuk membahas berbagai program dan kegiatan serta kendala dan masalah yang berkaitan dengan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata termasuk Ekonomi Kreatif di Kalimantan Tengah.

Disebutkan, Kalimantan Tengah 2019 telah menoreh banyak prestasi di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata yang akan terus dipertahankan, ditingkatkan dan dievaluasi. “Saya menginstruksikan semua Kepala Dinas Kabupaten/Kota agar kerja keras, koordinasi, sinkronisasi dan penguatan program meningkatkan kuantitas dan

kualitas pelayanan publik di bidang kepariwisataan pada tahun 2020 ini”, ujar Gubernur.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Guntur Talajan menjelaskan capaian prestasi dan kemajuan kebudayaan dan pariwisata Kalimantan Tengah tahun 2019, diantaranya penari Kalteng turut terlibat dalam aksi tari 24 jam nonstop pada Hari Tari Sedunia di Solo dan Tarian Dadas tampil di Istana Kepresidenan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke 74 Kemerdekaan RI 2019.

Selain itu, Desa Kereng Bangkirai dan Taman Nasional Sebangau juga mendapat penghargaan tertinggi yaitu Indonesian Sustainable Tourism Award 2019 (ISTA) dari Kementerian Pariwisata RI untuk destinasi yang telah menerapkan sistem pariwisata berkelanjutan.

Rapat Kerja Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng 2020 tersebut menyusun calendar event di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan tingkat Internasional. “Untuk event nasional ada Festival Budaya Isen Mulang di Palangka Raya, Festival Babukung di Kabupaten Lamandau dan Festival Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan untuk event internasional adalah Wonderful Sail to Indonesia di Kumai, Tanjung Puting dan Maret nanti Raja dan Ratu Belanda akan mengunjungi Palangka Raya” jelas Guntur Talajan.\*\*\*

## **Wagub Resmikan M'Lounge Badara Tjilik Riwut Palangka Raya**

Palangka Raya – Biro PKP. PT.Angkasa Pura II terus melakukan pembenahan dan penyediaan fasilitas baru di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, diantaranya penyediaan M'Lounge di salah satu ruang tunggu terminal Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Fasilitas M'Lounge ini terbagi dalam Tiga Kelas terdiri Ruang Tunggu Umum untuk keberangkatan serta Ruang Pertemuan VIP terbagi dua yaitu untuk VIP dan VVIP yang dapat disewa, dengan luas ruangan 250 meter persegi dan mampu menampung 150 orang.

M'Lounge Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya ini dilengkapi dengan fasilitas bantuan check in dan fasilitas langsung menuju gate, ruang ibadah, sajian buffet, ruangan khusus merokok, wifi area (internet) serta pemjemputan dari area kedatangan untuk tamu VIP yang langsung diantar menuju ruang pertemuan VIP atau VVIP.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengharapkan pengelola Bandara agar dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk memperkenalkan Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. “Saya berharap fasilitas

M'Lounge ini dapat membantu mengenalkan tempat-tempat wisata ,adat-istiadat dan budaya atau kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah serta memberikan kesan yang baik kepada penumpang yang berkunjung ke kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah pada umumnya”, kata Habib Ismail Bin Yahya ketika meresmikan M'Lounge Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Senin (11/02/2020).

Habib Ismail juga mengharapkan keberadaan fasilitas M'Lounge Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.

Terminal Bandara Tjilik Wiwut Palangka Raya seluas 29.124 meter persegi yang diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Maret 2020 itu mampu melayani 2.200 pengguna jasa penerbangan setiap hari.

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya selain sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Kalimantan Tengah, juga menjadi ikon baru bagi masyarakat Kalimantan Tengah karena desain terminalnya megah dan modern.\*\*\*



## Presiden Jokowi Hadiri HPN 2020 Di Banjarbaru Kalsel

Banjarbaru – Biro PKP. Platform digital global saat ini membanjiri Indonesia. Namun pada saat bersamaan, tidak ada regulasi yang mengatur platform digital tersebut sehingga platform digital asing melenggang kangkung tanpa dibatasi perundang-undangan untuk menikmati keuntungan ekonomi, sementara regulasi yang ada hanya mengatur media konvensional.

Presiden Joko Widodo sangat menyadari adanya kekosongan regulasi yang mengatur platform digital asing. Karena itu, pemerintah segera menyiapkan regulasi untuk memproteksi dunia pers dari serangan platform digital asing. “Regulasi itu dibutuhkan untuk melindungi ekosistem media massa sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang baik”, kata Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarbaru Kalimantan Selatan, Sabtu (08/02/20).

Platform digital asing masuk begitu saja dan mengancam dunia pers tanah air karena ketiadaan regulasi. Meskipun tidak memiliki aturan main dan tidak membayar pajak, platform itu bisa mengambil iklan dalam jumlah besar. “Saya minta untuk segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita”, lanjut Jokowi.

Menurut Jokowi, negara sangat membutuhkan kehadiran pers dalam situasi yang jernih untuk melawan penyakit seperti hoax, ujaran kebencian hingga fitnah yang mengancam demokrasi. “Karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik”, tegas Presiden.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan ketimpangan dan ketiadaan regulasi itu sudah lama membelenggu dunia pers yang selama ini dikenal sebagai kekuatan keempat demokrasi. “Karena itulah Dewan Pers memfasilitasi pembentukan

Kelompok Kerja (Pokja) Keberlanjutan Media pada 21 Januari 2020”, ungkap M.Nuh.

Menurut rencana, Pokja akan memberikan rekomendasi regulasi kepada pemerintah. Regulasi itu akan mengatur hubungan antara penerbit pers dan platform digital atau agregator berita. Hubungan itu terkait dengan kerjasama konten, data dan pembagian keuntungan.

Sementara itu Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengharapkan regulasi itu nanti tidak hanya menjamin terjadinya persaingan bisnis media yang sehat dan seimbang, tetapi pada saat yang bersamaan diharapkan mampu memberantas virus hoax yang menjalar melalui media sosial.

Seusai memberikan sambutan pada Peringatan HPN 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani yang didampingi Gubernur Kalsel Syahbirin Noor, Ketua Panitia HPN Atal S. Depari, Ketua Dewan Pers M. Nuh serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan para Duta Besar meresmikan Taman Hutan Pers dan penanaman pohon mersawa di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Selatan.\*\*\*



Pakar. Ketua Umum KWOD Guntur Taladjan, Sekretaris Jenderal E.P Romong dan Bendahara Umum Mariani Sabran yang dilengkapi dengan 14 Bidang.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ketika melantik dan mengukuhkan Pengurus Kerukunan Warga Ot Danum tersebut mengharapkan agar organisasi KWOD dapat membantu pemerintah melalui berbagai kiprahnya dan sikap nasionalisme di segala kehidupan demi tercapainya tujuan negara. "Tugas mulia segenap pengurus KWOD sebagai salah satu bagian penting di dalam pembauran kebangsaan dalam mewujudkan kerukunan nasional untuk memperkokoh integrasi bangsa", tegas Gubernur.

Sugianto mengharapkan kepada Pengurus KWOD Periode 2020-2025 agar segera mendaftarkan/melaporkan keberadaan organisasinya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sugianto Sabran dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringing Timur agar disikapi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan kedewasaan politik, nilai-nilai demokrasi serta menciptakan suasana dan aman damai di lingkungan masing-masing.

Sugianto Sabran menekankan pentingnya membangun Kalteng tanpa membicarakan perbedaan, namun bagaimana Kalteng lebih baik dan bermartabat. "Jalin silaturahmi sesama suku Dayak. Organisasi jangan sampai terpecah oleh kepentingan politik. Rajut kebersamaan untuk membangun Kalteng dan jaga budaya Dayak sebagai kekuatan pariwisata dalam menjaga peradaban," imbuhnya.

Gubernur Sugianto Sabran se usai melantik dan mengukuhkan Pengurus Kerukunan Warga Ot Danum tersebut, menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada 15 sanggar seni di Kota Palangka Raya dan 200 penari yang partisipasi dalam Festival Budaya Isen Mulang 2019.\*\*\*



## **GUBERNUR KUKUHKAN PENGURUS KERUKUNAN WARGA OT-DANUM**

**PALANGKA RAYA – PKP.** Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengukuhkan Pengurus Kerukunan Warga Ot-Danum (KWOD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota Periode 2020-2025 di Aula Hasupa Hasundau Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (12/02/2020).

Pengurus Inti KWOD itu terdiri Dewan Pembina Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Dewan Pendiri Siun Jarias, Dewan Pelindung Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno, Dewan Kehormatan J. Djudae Anom, Agustiar Sabran dan Nila Riwut serta 16 orang Dewan Penasehat dan 10 orang Dewan





## Gubernur Harapkan Kader HMI Mampu Hadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0

PALANGKA RAYA – dan Pembangunan Nurul Edy saat membuka Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional HMI Cabang Palangka Raya di Mess KKMA Kehutanan Palangka Raya, Rabu pagi (12/02/2020).

Gubernur Kalteng mengharapkan Latihan Kader II Nasional HMI ini mampu menjadi media dalam menggali potensi dan informasi faktual sesuai perkembangan arus globalisasi dan teknologi industri yang semakin pesat. "Saya berkeyakinan Kader HMI mampu beraktualisasi dan berperan aktif sebagai kader umat dan

Demikian harapan Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan yang disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian

kader bangsa yang mempunyai kemampuan berkarya yang positif, kreatif dan memiliki gagasan maupun ide-ide baru, inovatif dan kekinian," imbuhnya.

Sementara itu Ketua HMI Palangka Raya Riko Rahman menerangkan arti penting Latihan Kader (LK) tersebut dan juga menegaskan peran yang harus diambil kader HMI saat sekarang. "LK II ini merupakan bagian wajib teman-teman berproses di HMI. Kalau bicara HMI saat ini, HMI tidak bisa lagi kita identikkan dengan demonstrasi, mengkritisi. Bagaimana Kader HMI hadir sekarang adalah memberikan solusi nyata untuk daerahnya," tegas Riko Rahman.

Pelatih Kader tersebut mengusung tema "Terbinanya Kader HMI Yang Mempunyai Kemampuan Intelektual Untuk Memetakan Peradaban dan Memformulasikan Gagasan Dalam Lingkup Organisasi."

Latihan Kader II Tingkat Nasional HMI yang akan berlangsung dari tanggal 12-18 Februari 2020 ini diikuti lebih dari 50 orang peserta dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Malang, Pekanbaru dan Bone.

Turut hadir pada pembukaan tersebut Staf Ahli Wali Kota Palangka Raya Supriyanto, Ketua KNPI Kalteng Rahmat Handoko dan Sekjen Majelis Wilayah KAHMI Kalteng Fauzan Ahmad serta sejumlah pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. \*\*\*



## Geliatkan Sektor Pariwisata, Pasar Hamalem Mangkeme Resmi Dibuka

PANGKALAN BUN – Biro PKP. Pasar Hamalem Mangkeme yang berlokasi di pinggir Sungai Arut Kelurahan Mendawai Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat menawarkan aneka jajanan yang dijual kelompok UMKM setempat. Para pengunjung wisata kuliner di pinggir sungai tersebut juga bisa menikmati musik tradisional dan pemandangan Sungai Arut di waktu malam hari sembari mencicipi makanan khas lokal.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri yang didampingi Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah dan sejumlah Kepala PD Provinsi ketika ketika membuka Pasar Hamalem Mangkeme, Jumat malam (14/02/20) mengharapkan event yang bersifat pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan lapangan usaha bagi masyarakat lokal.

Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan masyarakat untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi maupun potensi masyarakat lokal. “Demikian juga di sektor pariwisata yang melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta terus mendapat dukungan dari pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah mengatakan pihaknya akan mengangkat destinasi wisata baru untuk menggeliatkan sektor pariwisata di wilayahnya. “Selain Taman Nasional Tanjung Puting yang sudah mendunia, kita juga akan menciptakan hotspot-hotspot destinasi wisata baru, baik itu yang kita angkat dari wisata alamnya, wisata buatan, wisata budaya, maupun wisata religi,” paparnya.

**Gubernur Sugianto  
Sabran Gelar Silaturahmi**

### **dengan Tokoh Masyarakat se-Kalteng**

Gubernur Sugianto Sabran, Sabtu malam (15/02/20) menggelar silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta ormas kemahasiswaan dan kepemudaan di Pangkalan Bun.

Sugianto Sabran menekankan program prioritasnya terus digenjot seoptimal mungkin di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. “Jadi kita harus kompak melaksanakan pembangunan, tanpa membedakan suku, agama, dan golongan,” kata Sugianto.

Masyarakat Kalteng harus bangkit dari kelemahan untuk menggapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. “Kita juga harus menjaga ketertiban dan keamanan Kalteng agar tetap kondusif,” tegas Sugianto.

Sementara itu, H. Abdul Rasyid, salah seorang tokoh masyarakat dan pengusaha yang sukses di level nasional dalam silaturahmi tersebut mengharapkan warga masyarakat agar hidup rukun dan damai. “Tidak lagi membicarakan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, tapi bersatu padu mengikat persatuan dan kesatuan demi NKRI,” tegas Abdul Rasyid.

Rasyid juga memacu dan mendorong generasi muda agar terus bersemangat menempa diri serta menggali dan mengembangkan potensi diri dengan kerja keras dan mempertahankan harga diri.

### **Gubernur Silaturahmi dengan Warga Kubu Kecamatan Kumai**

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan sejumlah pimpinan Perangkat

Daerah Provinsi Kalteng dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kotawaringin Barat, Minggu siang (16/02/2020) berinteraksi dengan warga masyarakat Kubu yang sedang menggelar “PESISIR BEGAYAP” dengan menyajikan aneka kuliner/non kuliner, lomba mewarnai tingkat TK dan pelayanan Samsat Keliling.

Seusai berdialog dan menyerap aspirasi warga masyarakat Kubu, Sugianto Sabran dan rombongan menuju lokasi pemancingan Kubu, Pantai Tanjung Keluang Kecamatan Kumai yang dikelola oleh salah seorang warga masyarakat setempat Kaspinor.

Di lokasi wisata mangrove tersebut, Sugianto Sabran meresmikan “Bukit Pemancingan Kubu” yang dikelola Kaspinor. Kawasan wisata mangrove dan bukit pemancingan tersebut merupakan kawasan pelestarian hutan termasuk hutan mangrove untuk mencegah erosi dan abrasi pantai sekaligus berfungsi sebagai penyaring alam.

Mangrove juga berfungsi mencegah intrusi air laut, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa serta berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir.

Sugianto Sabran bersama pengusaha nasional H. Abdul Rasid didampingi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat serta anggota DPRD Kalteng Maryani Sabran menyempatkan menanam pohon mangrove sekaligus mengajak masyarakat agar mencintai alam dengan harapan alam juga akan menjaga manusia. “Karena kita makhluk hidup harus bersinergi dan peduli dengan alam sekitar kita,” ucap Sugianto.

Sementara itu pemilik Mangrove Kubu dan Bukit Pemancingan Kaspinor menyerukan slogan “Langit Biru, Bumi Hijau, Laut Bersih, Kalteng Berkah”.\*\*\*



## Gubernur : Pelajar Harus Meningkatkan Kualitas Akhlak dan Menjauhi Narkoba



PANGKALAN BUN - BIRO PKP. Suasana di lingkungan SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, Senin pagi (17/02/2020) tampak semarak menyambut kedatangan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang didampingi Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah serta sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kehadiran Sugianto Sabran ke SMA Negeri 1 Pangkalan Bun ini untuk berdialog langsung dengan siswa-siswi kelas XI dan XII SMA/SMK/MA serta para guru se-Kota Pangkalan Bun.

Sebelum dialog, Sugianto Sabran menyerahkan 449 unit laptop secara simbolis kepada 13 Kepala Sekolah SMA yang tersebar di Kotawaringin Barat. Tahun 2019 juga telah diserahkan 834 unit laptop kepada SMA dan 786 unit laptop kepada SMK sehingga total laptop yang telah diserahkan tahun 2019 dan 2020 kepada SMA dan SMK di Kotawaringin Barat 3.134 unit termasuk pengadaan tahun 2018 sebanyak 1.065 unit.

Dalam dialognya dengan para guru dan siswa-siswi SMA/SMK dan MA di Pangkalan Bun tersebut, Sugianto Sabran mengharapkan Dinas Pendidikan, para guru dan komite sekolah agar terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng.

"Para guru dan orang tua murid juga harus bersinergi mendidik akhlak anaknya sehingga menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu, siswa-siswi juga harus menjauhkan diri dari Narkoba dan pergaulan bebas," tegas Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran juga kembali menegaskan sikapnya dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang tidak pandang bulu. Untuk itu warga masyarakat termasuk siswa-siswi harus membentengi diri dari bahaya Narkoba.

### **Sambangi Karang Mulia, Paparkan Prioritas Pembangunan**

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan rombongan se usai berdialog dengan para guru dan pelajar SMA/SMK/MA se-Kota Pangkalan Bun, melanjutkan kunjungan kerjanya ke Desa Karang Mulia Kecamatan Pangkalan Banteng, Senin (17/02/2020).

Di Desa Karang Mulia, Pangkalan Banteng, Sugianto Sabran berdialog dengan

masyarakat setempat di Aula Desa Karang Mulia untuk menjangring informasi sekaligus menjelaskan prioritas program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang terus digenjut seoptimal mungkin menggunakan sumber dana yang ada. "Tahun 2021 nanti, saya akan menuntaskan pembangunan beberapa ruas jalan provinsi termasuk membantu pihak kabupaten menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan," tegas Sugianto.

Sugianto juga meminta masyarakat yang berkecimpung dalam dunia usaha yang masuk kategori UMKM agar memanfaatkan jasa perbankan, seperti Bank Kalteng, tidak melalui rentenir.\*\*\*



## Gubernur: Pelajar Jauhi Narkoba dan Pergaulan Bebas

SAMPIT - BIRO PKP. Rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah yang terkait dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan ke Kabupaten Kotawaringin Barat sejak 14 Februari, dilanjutkan pertemuan dan dialog dengan para guru dan pelajar kelas XI dan XII SMA/SMK dan MA se-Kota Sampit di SMAN 3 Sampit Kotawaringin Timur, Selasa pagi (18/02/2020).

Sebelum dialog dengan para guru dan pelajar kelas XI dan XII SMA/SMK dan MA se-Kota Sampit, Sugianto Sabran melakukan Pengisian Data Sensus Penduduk 2020 secara online. "Mari kita sukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 untuk mendukung Kalteng Berkah," ujar Sugianto.

Selain berdialog dan mengisi data SP 2020, Sugianto Sabran juga menyerahkan 449 unit

laptop secara simbolis kepada perwakilan Kepala SMA/SMK dan MA Kota Sampit. Pengadaan laptop ini mulai tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan total 3.134 unit untuk mendukung UNBK SMA/SMK dan MA Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam dialog Gubernur Sugianto Sabran dengan para guru dan pelajar kelas XI dan XII se-Kota Sampit, masih mengemuka berbagai persoalan di dunia pendidikan yang harus terus disikapi dengan meningkatkan mutu pendidikan

termasuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kotawaringin Timur.

Selain pembangunan fisik, pembangunan mental spiritual dan akhlak juga mendapat perhatian pemerintah. "Jadi interaksi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan guru sangat diperlukan dalam pembangunan moralitas pelajar sebagai generasi penerus bangsa," tegas Sugianto.

Sugianto juga meminta para pelajar agar berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkoba, antara lain dengan menjauhi Narkoba dan pergaulan bebas.\*\*\*



## Wagub Kalteng Tinjau Sejumlah Desa Terpencil Di Barito Timur.

MUARA AWANG – BARITO TIMUR. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya bersama 50 orang Komunitas Motor Trail Adventure Palangka Raya menjelajah sejumlah desa terpencil di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Habib Ismail sebagai pencinta adventure dalam kunjungan kerjanya tanggal 1 dan Februari 2020 di Kabupaten Barito Timur menyempatkan diri meninjau beberapa obyek wisata antara lain air terjun Riam Kosing di Desa Muara Awang.

Selain meninjau obyek wisata air terjun Riam Kosing,

Habib Ismail juga menyerahkan bantuan buku, tas sekolah dan peralatan olahraga kepada siswa dan warga Desa Sumber Garunggung dan Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah serta untuk warga Desa Sibung dan Desa Puri Kecamatan Reren Batuah.

Habib Ismail menjelaskan kunjungannya yang diikuti Club Insan Trail Adventure (CINTA) Kalteng ke sejumlah desa terpencil di Barito Timur tersebut dalam rangka mendata dan menggali potensi wisata lokal sekaligus menyerahkan bantuan

kepada murid sekolah dan warga desa setempat. "Disamping ingin melihat desa-desa terpencil yang tidak bisa dijangkau dengan mobil, kami juga ingin melihat potensi pariwisata lokal untuk dikelola oleh warga desa terdekat," kata Wagub.

Upaya menggali dan mengembangkan obyek wisata lokal dengan melibatkan peran warga lokal sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Semua yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.\*\*\*



**H. SUGIANTO SABRAN**  
Gubernur Kalimantan Tengah



**HABIB ISMAIL BIN YAHYA**  
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



**“Dengan falsafah Huma Betang mari kita jalin silaturahmi sesama suku, rajut kebersamaan untuk membangun Kalteng BERKAH dan jaga budaya sebagai kekuatan pariwisata dalam menjaga peradaban.”**



<http://www.biropkp.kalteng.go.id>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



[http://www.twitter.com/setda\\_kalteng](http://www.twitter.com/setda_kalteng)



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)



[buletin.isenmulang@gmail.com](mailto:buletin.isenmulang@gmail.com)